List of Tax & Customs Regulation June Period I-2025

No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Tentang
1	PMK Nomor 36 Tahun 2025	4-Jun-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
2	PMK Nomor 34 Tahun 2025	26-May-25	Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 34 TAHUN 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
3	PER-11/PJ/2025	22-May-25	Ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPnBM dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
4	PER-10/PJ/2025	22-May-25	Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
5	PER-9/PJ/2025	22-May-25	Penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dalam rangka penanganan terhadap kegiatan penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah
6	PER-8/PJ/2025	21-May-25	Ketentuan pemberian layanan administrasi perpajakan tertentu dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi perpajakan
7	PER-7/PJ/2025	21-May-25	Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
8	PER-6/PJ/2025	21-May-25	Pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta special purpose company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah
9	PMK Nomor 29 Tahun 2025	14-May-25	Pengenaan Bea Masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk Expansible Polystyrene
10	SE-7/PJ/2025	2-May-25	Pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia
11	KEP-73/BC/2025	2-May-25	Penetapan secara [penuh (Mandatory) CEISA 4.0 tahap keduapuluh
12	20/KM.4/2025	30-Apr-25	Penetapan harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar
13	PER-4/PJ/2025	29-Apr-25	Perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-25/PJ/2020 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan pajak terutang, nota penghitungan, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan, surat pemberitahuan, serta surat tagihan pajak PBB
14	19/KM.4/2025	29-Apr-25	Penundaan pelaksanaan pengawasan ketentuan pembatasan impor dan ekspor berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 18/KM.4/2025 tentang barang yang dibatasi untuk diimpor dan diekspor berdasarkan peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan karantina indonesia nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
15	18/KM.4/2025	21-Apr-25	Barang yang dibatasi untuk diimpor dan diekspor berdasarkan peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan karantina indonesia nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
16	KEP-66/BC/2025	19-Apr-25	Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 tahap kesembilan belas

17	PMK Nomor 27 Tahun 2025	14-Apr-25	Mekanisme Penggantian Pajak Pertambahan Nilai dan Biaya Lain-Lain pada Hibah Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia
18	PMK Nomor 25 Tahun 2025	14-Apr-25	Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan
19	17/KM.4/2025	14-Apr-25	Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KM.4/2025 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
20	PER-3/PJ/2025	27-Mar-25	Perubahan keempat atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2022 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
21	KEP-79/PJ/2025	25-Mar-25	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh pasal 29 yg terutang dan/atau penyampaian SPT PPh Orang Pribadi utk tahun pajak 2024 sehubungan dgn hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka hari suci nyepi dan hari raya idul fitri
22	PENG-23/PJ.09/2025	25-Mar-25	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi utk tahun pajak 2024
23	10/KM.4/2025	21-Mar-25	Penetapan Jenis Satuan Barang Berupa Komoditas Expansible Polystyrene (EPS) dan Nylon Film yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor
24	PER-5/BC/2025	14-Mar-25	Perubahan Keenam Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor
25	8/KM.4/2025	13-Mar-25	Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KM.4/2025 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
26	4/KM.4/2025	12-Mar-25	Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor
27	6/KM.4/2025	12-Mar-25	Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
28	PMK Nomor 21 Tahun 2025	6-Mar-25	Pengenaan Bea Masuk antidumping terhadap impor produk nylon film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan
29	PER-4/BC/2025	4-Mar-25	Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone
30	PENG-20/PJ.09/2025	3-Mar-25	Kebijakan selama Ramadan 1446 H dan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2024
31	PER-3/BC/2025	28-Feb-25	Standar audit kepabeanan dan audit cukai
32	PER-2/BC/2025	28-Feb-25	Tata laksana audit kepabeanan dan audit cukai
33	PENG-19/PJ.09/2025	27-Feb-25	Ralat PENG-18/PJ.09/2025 ttg kebijakan penghapusan sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau
34	PMK Nomor 18 Tahun 2025	27-Feb-25	Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2025
35	KEP-67/PJ/2025	27-Feb-25	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yg terutang dan penyampaian surat pemberitahuan sehubungan dgn implementasi coretax
36	PMK Nomor 17 Tahun 2025	19-Feb-25	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
37	KT No.6/2025	13-Feb-25	Penerbitan faktur pajak
38	KEP-54/PJ/2025	12-Feb-25	Penetapan PKP tertentu
39	PENG-13/PJ.09/2025	12-Feb-25	Pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur client desktop
40	PMK Nomor 15 Tahun 2025	10-Feb-25	Pemeriksaan pajak
41	PMK Nomor 14 Tahun 2025	4-Feb-25	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

42	PMK Nomor 13 Tahun 2025	4-Feb-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
43	PMK Nomor 12 Tahun 2025	4-Feb-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
44	PMK Nomor 11 Tahun 2025	4-Feb-25	Ketentuan Nilai Lain sbg DPP dan besaran tertentu PPN
45	PMK Nomor 10 Tahun 2025	4-Feb-25	PPh 21 atas penghasilan tertentu yg ditanggung Pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun 2025
46	KT-05/2025	4-Feb-25	Pembaruan informasi terkini implementasi coretax DJP
47	SE-1/PJ/2025	24-Jan-25	Perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas komisi reasuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan imbalan jasa keperantaraan yang diterima atau diperoleh perusahaan pialang reasuransi sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian
48	PMK Nomor 9 Tahun 2025	24-Jan-25	Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina
49	PMK Nomor 8 Tahun 2025	24-Jan-25	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (Slag Wool) dan Wol Batuan (Rock Wool)
50	PENG-1/PJ/2025	24-Jan-25	Daftar yuridiksi partisipan dan yuridiksi pelaporan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchange of financial account information/AEOI) tahun 2025
51	PMK Nomor 7 Tahun 2025	21-Jan-25	Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
52	PENG-9/PJ.09/2025	21-Jan-25	Pelaporan SPT Tahunan PPh
53	KEP-24/PJ/2025	15-Jan-25	Penetapan PKP tertentu
54	KT-03/2015	13-Jan-25	Keterangan Tertulis ttg perkembangan coretax DJP
55	PENG - 1/PJ.09/2025	8-Jan-25	Waspada Penipuan Yang Mengatasnamakan Direktur Jenderal Pajak
56	PMK Nomor 4 Tahun 2025	6-Jan-25	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
57	PER-1/PJ/2025	3-Jan-25	Petunjuk teknis pembuatan faktur pajak dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
58	PMK Nomor 136 Tahun 2024	31-Dec-24	Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
59	PMK Nomor 135 Tahun 2024	31-Dec-24	Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
60	PMK Nomor 131 Tahun 2024	31-Dec-24	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
61	PMK Nomor 119 Tahun 2024	23-Dec-24	Perubahan ketiga PMK 39/PMK.03/2018 ttg tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
62	PMK Nomor 118 Tahun 2024	23-Dec-24	Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan
63	PMK Nomor 117 Tahun 2024	23-Dec-24	Tata cara penghapusan piutang pajak
64	PMK Nomor 114 Tahun 2024	23-Dec-24	Audit Kepabeanan dan Audit Cukai